

## KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 merupakan pedoman pelaksanaan kinerja bagi unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Penyusunan Renstra Setda mempedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2012-2017.

Materi Rancangan Awal Renstra disusun secara partisipatif dengan menyerap aspirasi dari segenap pemangku jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, sehingga diharapkan menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab pada periode 2012-2017. Selain itu dokumen Rancangan Awal Renstra diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, sekaligus sebagai acuan penilaian pejabat atasan kepada penanggung jawab teknis kegiatan dilingkungan kerjanya serta sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja unit kerja kepada Walikota.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun dokumen Rancangan Awal Renstra ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Renstra ini.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhai usaha kita dalam membangun masa depan Kota Banda Aceh sebagai model Kota Madani.

Banda Aceh, Oktober 2012  
an. **WALIKOTA BANDA ACEH**  
**Sekretaris Daerah Kota**

**Drs. T. SAIFUDDIN TA, M. Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19541110 197801 1 001**

## DAFTAR ISI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

1

1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Landasan Hukum .....	3
1.3.	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4.	Sistematika Penulisan.....	5

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN

SKPD.....	8	
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	8
2.2.1.	Tugas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	8
2.2.2.	Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	8
2.2.3.	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	9

2.2	Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	10
2.2.1.	Sumber Daya Manusia .....	10
2.2.2.	Aset/modal .....	11
2.2.3.	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	11
a.	Bagian Tata Pemerintahan .....	11
b.	Bagian Hukum .....	12
c.	Bagian Keistimewaan .....	12
d.	Bagian Administrasi Pembangunan .....	13
e.	Bagian Administrasi Perekonomian.....	14
f.	Bagian Organisasi .....	15
g.	Bagian Humas .....	15
h.	Bagian Umum .....	16

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	24
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	24
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD.....	29
3.4.	Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	29
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis .....	29
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	31
4.1.	Visi dan Misi .....	31
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	32
4.3.	Strategi dan Kebijakan SKPD.....	35
4.3.1.	Kekuatan (Strengths) .....	37
4.3.2.	Kelemahan (Weakness) .....	37

4.3.2.	Peluang (Opportunity) .....	38
4.3.4	Ancaman (Threats) .....	38
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	40
5.1.	Program .....	40
5.2.	Kegiatan .....	55
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	56
BAB VI	..... PENUTUP	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan administratif kepada seluruh perangkat daerah serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 30 Oktober 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk memudahkan dalam proses evaluasi kinerja pemerintah maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas birokrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

Berdasarkan ilustrasi diatas Rencana Stratejik (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007-2012, disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi lingkungan strategis kekinian Kota Banda Aceh. Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disamping didasari pada hasil kajian terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai serta kendala-kendala yang belum tertangani dalam periode pembangunan sebelumnya.

Lingkungan strategis lainnya yang turut dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra ini adalah Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012, dan terpilihnya pimpinan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang baru sehingga menjadi dasar berpijaknya perumusan dan penyempurnakan Renstra ini yang dapat mendukung kebijakan Kota Banda Aceh ke depan.

Renstra disusun dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Untuk merespon perubahan lingkungan karena kondisi lingkungan yang cepat berubah dan yang penuh dengan ketidakpastian;
2. Untuk mengatur hasil yang dicapai;
3. Untuk alat manajerial yang penting;
4. Untuk orientasi ke masa depan;
5. Untuk dapat dilakukan penyesuaian seperlunya;
6. Untuk memenuhi kebutuhan publik;
7. Untuk menjadi dokumen perencanaan.

Pengertian perencanaan strategis adalah:

**Pertama:** Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

**Kedua:** Proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur tingkat keberhasilannya.

**Ketiga:** Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Keempat:** Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan dan berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikan proses strategi pencapaian tujuan.

**Kelima:** Sejumlah langkah atau taktik yang dirancang sebagai komitmen organisasi. Master plan atau rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuannya

dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya. Kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan untuk kelangsungan hidup.

**Keenam:** Serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Perencanaan yang dimaksudkan untuk mengarahkan segenap potensi yang ada untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tujuan yang akan dicapai tersebut terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu gambaran masa depan yang ingin diwujudkan yang lebih dikenal dengan visi. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan visi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam beberapa misi yang harus dijalankan, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Perencanaan strategis di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh disusun untuk kemudian menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah atau Renstra-SKPD, termasuk untuk penyusunan Renstra SKPD Sekretariat Daerah.

Perencanaan strategis bagi satuan kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh menjadi sangat penting karena dapat membantu dan menentukan arah masa depan satuan kerja perangkat daerah sekaligus mendukung visi dan misi organisasi Pemerintahan Kota Banda Aceh.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007 - 2012 didasarkan pada :

1. Landasan Ideal: Pancasila
2. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional:
  1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh 2007 -2027.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan perencanaan strategis ini disusun untuk menjabarkan lebih lanjut visi dan misi Kota Banda Aceh ke dalam visi dan misi Sekretariat Daerah berdasarkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai service staff maupun dalam fungsi auxiliary staff dan dijadikan acuan lebih lanjut untuk Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dimaksudkan :

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD dan sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan suatu tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.

Adapun tujuan penyusunannya adalah :

1. Menguraikan agenda pembangunan serta mengintegrasikannya ke dalam Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi pedoman bagi unit-unit dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam menyusun program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007-2012 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang  
Menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Fungsi Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- 1.2 Landasan Hukum  
Memuat Penjelasan tentang Perundang – undangan terkait.
- 1.3 Maksud dan Tujuan  
Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra
- 1.4 Sistematika Penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon di bawah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Memuat tentang sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Menguraikan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Memuatkan hasil analisis terhadap renstra yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh serta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini menjelaskan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh terkait dengan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Mengemukakan apa saja faktor –faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menjelaskan tentang factor – factor yang mempengaruhi isu – isu strategis.

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Merumuskan pernyataan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran serta kebijakan yang mendukung visi, misi Kepala Daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Melaksanakan Pembangunan sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

**BAB VII PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

##### a. Tugas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Sesuai amanah Pasal 5 ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

##### b. Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Fungsi Sekretariat Daerah sesuai Pasal 5 ayat (2) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Kota Banda Aceh adalah:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintahan daerah.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah.
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, Setda mempunyai kewenangan:

- a. mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;

- d. melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah Kota; dan
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

**c. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sesuai dengan

maksud Qanun Nomor 2 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Asisten masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota melalui Asisten yang membidangnya.

Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh berada pada jenjang eselonering II.a, yang susunan organisasinya terdiri dari 3 (tiga) Asisten (eselon II.b) dan 8 (delapan) Bagian (eselon III.a) yaitu :

**a. Asisten :**

- 1. Asisten Pemerintahan
- 2. Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan
- 3. Asisten Administrasi Umum

**b. Bagian**

- 1. Bagian Tata Pemerintahan
- 2. Bagian Hukum
- 3. Bagian Administrasi Perekonomi
- 4. Bagian Administrasi Pembangunan
- 5. Bagian Keistimewaan
- 6. Bagian Organisasi
- 7. Bagian Humas

## 8. Bagian Umum

### 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

#### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Perincian jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, baik pemangku jabatan struktural maupun non struktural (staf) diperinci menurut Bagian dan jenis kelamin sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

TABEL 1

#### PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jabatan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekda	1	-	1
2	Asisten	3	-	3
3	Staf Ahli	5	-	5
4	DPB	7	-	7
5	Bagian Tata Pemerintahan	11	3	14
6	Bagian Hukum	7	3	10
7	Bagian Adm. Perekonomian	6	4	10
8	Bagian Adm. Pembangunan	10	5	15
9	Bagian Keistimewaan	5	4	9
10	Bagian Organisasi	7	4	11
11	Bagian Humas	7	4	11
12	Bagian Umum	37	17	54
	Jumlah	106	44	150

Sumber data : *Bagian Organisasi 2015*

TABEL 2

## PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

No	Jabatan	I	II	III	IV	Jumlah
1	Sekda	-	-	-	1	1
2	Asisten	-	-	-	3	3
3	Staf Ahli	-	-	-	5	5
4	DPB	-	-	-	7	7
5	Bagian Tata Pemerintahan	-	7	6	1	14
6	Bagian Hukum	-	3	6	1	10
7	Bagian Adm. Perekonomian	-	3	5	2	10
8	Bagian Adm. Pembangunan	-	8	6	1	15
9	Bagian Keistimewaan	1	3	4	1	9
10	Bagian Organisasi	-	4	5	1	10
11	Bagian Humas	-	4	5	1	10
12	Bagian Umum	-	28	24	1	53
	Jumlah	1	60	61	25	147

Sumber data : *Bagian Organisasi 2015*

### 2.2.2. Aset/modal

Sekretariat Daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota, seperti gedung perkantoran, jalan dan taman. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah Kota Banda Aceh berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah kota, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Diharapkan dengan Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tersebut adalah memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah kota, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah Kota Banda Aceh.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Sesuai dengan Qanun No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat Daerah Kota memiliki Seorang Sekda, 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Bagian. Dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Banda Aceh Sekretariat Daerah Kota Banda diperlukan dukungan semua pihak, dimana dengan dukungan tersebut diharapkan eksistensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud. Adapun diskripsi kondisi umum pelayanan di masing-masing Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

#### **a. Bagian Tata Pemerintahan**

Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh didukung oleh 20 (dua puluh) pegawai yang ditempatkan pada saat ini pada lantai II Gedung A, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian, 3 (tiga) orang Kepala Subbagian yaitu Subbagian Pertanahan dan Pemetaan Wilayah, Subbagian Otonomi Daerah dan Subbagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, 10 (Sepuluh) orang tenaga Staf serta 1 (satu) orang tenaga Honorer. Dengan Klasifikasi Pendidikan yang terdiri dari 6 (enam) orang berpendidikan Sarjana, 1 (Satu) orang Ahli Madya, dan 7 (Tujuh) orang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Dengan rutinitas yang sangat padat pada beberapa kegiatan seperti Pembebasan Tanah/Ganti Rugi Tanah, Sertifikasi, Pematokan, Pengukuran, Penertiban Aset Tanah Pemko, Tapal Batas Kecamatan dan Gampong, Kegiatan Pilpres dan lain-lain, terdapat kendala pada kurangnya tenaga staf terutama yang berpendidikan Sarjana.

#### **b. Bagian Hukum**

Bagian hukum terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bagian, 3 (Tiga ) Subbagian yaitu Subbagian Peraturan Perundang-undangan, subbagian bantuan hukum,

Pembinaan PPNS dan HAM, dan Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Adapun jumlah pegawai sebanyak 6 Orang Staf dan yang terdiri atas 2 orang Magister, 4 orang sarjana hukum, 1 orang DIII, dan 3 orang SMA.

Tugas utama Bagian Hukum adalah sebagai pembina dan penyusun produk hukum daerah, penanganan perkara atau kasus secara litigasi dan non-litigasi terhadap aparatur pemerintah, melakukan membina terhadap PPNS serta desiminasi, sinkronisasi dan harmonisasi HAM baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya bagian hukum merupakan pusat informasi hukum pemerintah kota Banda Aceh dalam website: [www.bagianhukum.bandaacehkota.go.id](http://www.bagianhukum.bandaacehkota.go.id).

Kendala yg dihadapi saat ini adalah kurangnya SDM bidang hukum, diantaranya jumlah pegawai yang memahami legal drafting 3 orang, pegawai yg memahami praktek dan penyusunan berita acara di pengadilan berjumlah 2 orang dan pegawai yang memahami jaringan dokumentasi hukum 2 orang. Jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan volume kerja yang dihadapi bagian hukum saat ini.

**c. Bagian Keistimewaan**

Bagian Keistimewaan merupakan salah satu penunjang kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Bagian ini sebagai ujung tombak dalam menghadapi permasalahan masyarakat khususnya pada bidang sosial kemasyarakatan, keagamaan, adat istiadat dan pendidikan serta bidang yang menyangkut keistimewaan aceh dalam menunjang visi dan misi pemerintah Kota Banda Aceh yaitu untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.

Kondisi sekarang dengan struktur baru sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2008 dimana tugas dan fungsi telah dibagi secara merata kepada tiga Subbagian yaitu subbagian sosial keagamaan, subbagian sosial kemasyarakatan dan subbagian keistimewaan. Adapun jumlah perangkat dan personil sampai dengan saat ini belum memadai dengan demikian perlu adanya penambahan sarana dan rekrutmen pegawai yang profesional dan terampil.

**d. Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan 1 (satu) dari 8 (delapan) bagian yang berada di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 15 (Lima belas) orang. Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh 1 (Satu) Orang Kepala Bagian yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Klasifikasi pendidikan pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 (Tiga) orang magister, 4 (empat) orang sarjana, dan 8 (delapan) orang SMU serta 1 (Satu) orang Tenaga Honorer.

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan yang bertujuan untuk menjaring tenaga yang terampil dibidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersertifikasi.

Selama ini pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih dilaksanakan oleh Unit Layanan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan jumlah personil sebanyak 20 orang yang merupakan staf PNS dari beberapa SKPD dalam Lingkungan Kota Banda Aceh. Unit Layanan ini dibentuk karena di beberapa SKPD belum memadainya tenaga pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersertifikasi sehingga untuk melakukan pelelangan Barang/Jasa masih terkendala.

Dibidang pelaporan sampai saat ini belum ada kendala yang berarti disebabkan hampir sebagian besar Dinas/Kantor telah menyampaikan hasil laporan realisasi fisik dan keuangan secara rutin dan tepat waktu.

Layanan informasi secara elektronik melalui MIMS (*Municipality Information Management System*) yang telah dan sedang berjalan selama ini dimana pengelolaannya langsung ditangani oleh Bagian Administrasi Pembangunan dirasakan sangat banyak membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyampaikan informasi/koordinasi/kerjasama dengan Dinas/Badan/ Lembaga baik antar SKPD dalam Kota Banda Aceh maupun diluar Kota Banda Aceh.

Bagian Administrasi Pembangunan untuk saat ini juga melayani Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*E-Procurement*), sehingga rekanan dapat mendaftarkan perusahaannya melalui internet tanpa harus datang ke Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini tentu sangat membantu dalam efisiensi dan efektifitas waktu.

Dalam hal Bimbingan Teknis Pengadaan barang/Jasa Pemerintah masih menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 hingga tahun

2010, dibutuhkannya tenaga yang terampil dan memiliki sertifikat untuk setiap SKPD idealnya sebanyak 5 orang, sedangkan sampai saat 2010 yang ada hanya sebanyak 102 orang dengan klasifikasi L2 sebanyak 84 orang dan L4 sebanyak 18 orang yang terdiri dari staf beberapa SKPD, dan semenjak diterapkan peraturan baru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2010 jo peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka klasifikasi L2 dan L4 dikonversi menjadi Sertifikasi Dasar. Serta Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengetahuan dasar, menengah dan lanjutan.

Dibidang Pelaporan yang ingin diwujudkan ke depan adalah sistem pelaporan secara on line dan dapat diakses secara cepat dan tepat antar SKPD dan Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pada kegiatan Kerjasama Pembangunan yang merupakan salah satu kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melakukan pertemuan serta berkoordinasi dengan donatur/investor dalam dan luar negeri dalam mendukung pencapaian visi/misi Kota Banda Aceh. Selain program dan kegiatan di atas, Bagian Administrasi Pembangunan juga merencanakan program pemanfaatan teknologi informasi dengan membentuk sistem informasi layanan publik dan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat dengan harapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan optimal sesuai standar pelayanan minimum.

Program lain yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan ke depan juga terkait dengan Pemanfaatan Ruang, dimana nantinya masyarakat juga terlibat dalam menata Kota Banda Aceh ke depan menjadi lebih tertib dan teratur.

**e. Bagian Administrasi Perekonomian**

Bagian Administrasi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Klasifikasi pendidikan terdiri dari Pascasarjana sebanyak 2 (dua) orang, sarjana sebanyak 5 (Lima) orang dan SMU sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah diikuti beberapa Staf untuk mengikuti pendidikan penjenjangan maupun diklat teknis untuk mengatasi pengaruh dan tantangan global serta pengembangan IPTEK antara lain:

- Pendidikan Penjurangan
  - Spama/Pim III : 1 orang
  - Adumla : 3 orang
  - Adum/Pim IV : 1 orang
  - Jumlah : 5 orang
  
- Diklat Teknis
  - Bendahara Daerah/ Keuangan Negara : 3 orang
  - Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah : 1 orang
  - Ahli Hukum Kontrak : 1 orang
  - Jumlah : 5 orang

**f. Bagian Organisasi**

Kondisi saat ini jumlah pegawainya berjumlah 11 orang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) orang Kepala Bagian, 3 (tiga) orang Subbagian. Serta dibantu 10 orang staf dengan komposisi pegawai 1 (satu) orang pascasarjana, 4 (empat) orang sarjana, 1 (satu) orang diploma dan 5 (lima) orang SMU.

Pada masing-masing Subbagian Idealnya sudah mengikuti diklat teknis secara sistematis, akan tetapi hal itu belum terwujud dengan baik. Bagian Organisasi merupakan ujung tombaknya pemerintah kota ini bisa dilihat dari tugas pokok dan fungsinya. Untuk itulah kiranya personil yang ditempatkan pada Bagian Organisasi adalah orang-orang yang produktif, kritis dan inovatif. Saat ini Bagian Organisasi dirasakan masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur yang ahli di bidang penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, penataan kelembagaan serta penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja. Untuk mengatasi problem tersebut kiranya perlu upaya peningkatan aparatur melalui khursus atau diklat teknis demi menunjang kelancaran tugas.

Adapun diklat yang perlu di ikuti oleh Subbagian dan Staf antara lain; Diklat analisis dan formasi jabatan, diklat penyusunan tupoksi dan uraian tugas, diklat analisis beban kerja, diklat Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah, Diklat Manajemen Kepegawaian, Diklat Tata Naskah Dinas, Diklat Penyusunan Standar Pelayanan Miniman, dan Pelayanan Publik.

**g. Bagian Humas**

Kondisi saat ini jumlah pegawainya berjumlah 11 orang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) orang Kepala Bagian, 3 (tiga) orang Subbagian. Serta dibantu 7 orang staf dengan komposisi pegawai 1 (satu) orang pascasarjana, 5 (lima) orang sarjana 1 (satu) orang diploma dan 4 (empat) orang SMU.

Berbicara mengenai kondisi ril Bagian Humas, sesuai data dan fakta harus diakui bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Fakta dan kenyataan tersebut dapat digambarkan di Subbag. Penyiapan Naskah, Pemberitaan dan Dokumentasi belum mempunyai tenaga ahli dalam penyusunan naskah pidato maupun tenaga fotografer yang profesional, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM dan belum didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang maksimal, jumlah tenaga penyusun naskah pidato yang ada saat ini berjumlah 4 orang.

Pada Subbag. Hubungan Kelembagaan dan Media Center juga masih ditemukan kekurangan terutama dalam hal penyiapan *press release*, memberikan informasi baik cetak maupun elektronik. Pada Subbag. Propaganda dan Advokasi juga masih ditemukan kekurangan, diantaranya belum adanya tenaga ahli di bidang hukum dan propaganda.

#### **h. Bagian Umum**

Bagian Umum merupakan bagian yang melayani administrasi primer di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan : 1 (satu) orang Kepala Bagian, 3 (tiga) orang Subbagian yaitu subbagian Tata Usaha dan Sandi, subbagian Rumah Tangga dan Protokoler dan Subbagian Keuangan. Dengan jumlah pegawai 50 orang dan honorer 4 orang.

Tugas dan Fungsi yang diemban Bagian Umum berkaitan dengan Protokoler Kepala Daerah, Pengamanan Kepala Daerah dan Sekretariat, pelayanan kedinasan, penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah dalam dan luar negeri, mengkoordinir rapat koordinasi unsur Muspida dan Pejabat Daerah, menyediakan tenaga kebersihan (*cleaning service*), penyediaan alat tulis kantor dilingkungan Sekretariat Daerah, penyediaan komponen listrik dan instalasi, penyediaan jasa komunikasi/instalasi, pemeliharaan kantor/pendopo dan kendaraan dinas, pengelolaan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan sekretariat daerah.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pegawai yang memahami tentang protokoler dan persandian, kurangnya sarana pendukung persandian, terbatasnya SDM aparatur yang menguasai dibidang komputer dan keuangan. Untuk masalah kearsipan surat menyurat masih dilakukan secara manual.

Untuk dapat melihat tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Kota, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 pada lampiran laporan ini.

Dari Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dan Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretaria Daerah Kota Banda Aceh, dapat dilihat ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut.

**a. Bagian Administrasi Pembangunan**

Berdasarkan pada Tabel tersebut di Bagian Administrasi Pembangunan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pelelangan Jasa Konstruksi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang baik karena dari tahun 2007-2011 rasionya terus meningkat, hal ini juga didukung oleh prosedur/mekanisme kegiatan yang dilaksanakan semakin mengarah kepada efisiensi anggaran dengan diterbitkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 23 Juli 2008.

Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang baik karena dari tahun 2007-2011 rasionya terus meningkat, hal ini juga didukung oleh prosedur/mekanisme kegiatan yang dilaksanakan semakin mengarah kepada adanya jaringan komunikasi (*website*) dan berkembangnya jaringan komunikasi dan informasi, seperti :

- 1). <http://bandaacehkota.go.id>,
- 2). <http://mail.bandaacehkota.go.id>,
- 3). <http://lpse.bandaacehkota.go.id>,
- 4). <http://lpm.bandaacehkota.go.id>,
- 5). <http://hukum.bandaacehkota.go.id>,
- 6). <http://aset.bandaacehkota.go.id>,
- 7). <http://peta.bandaacehkota.go.id>,
- 8). <http://kpptsp.bandaacehkota.go.id>,

- 9). <http://bandaacehtourism.com>,
- 10). <http://peta.bandaacehkota.go.id>,
- 11). <http://bappeda.bandaacehkota.go.id>,
- 12). <http://kebersihan.bandaacehkota.go.id>.

Untuk kegiatan Pelaporan Program Pembangunan juga memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang baik karena dari tahun 2007-2011 rasionya terus meningkat, hal ini juga didukung oleh prosedur/mechanisme kegiatan yang dilaksanakan semakin mengarah pada pelaporan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 23 Juli 2008. Selain itu juga rutin dilakukan rapat mingguan pelaporan untuk seluruh SKPD.

**b. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas)**

Berdasarkan pada Tabel 2.1. tersebut di Bagian Hubungan Masyarakat pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang sangat baik dengan kenaikan rasio terus menerus dari tahun 2007-2011, hal ini juga didukung oleh prosedur/mechanisme kegiatan yang dilaksanakan semakin mengarah kepada terkomunikasinya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta interaksi dengan masyarakat, dengan pembentukan Badan Koordinator Kehumasan (Bakohumas), pada tanggal 23 Juli 2010 untuk menghidupkan kembali sistem jejaring kehumasan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di jajaran Pemko Banda Aceh, serta sarana komunikasi di dalam membangun hubungan timbal balik antara Humas dengan media. Keberhasilan ini tercapai berkat adanya media massa/elektronik yang dikelola pemerintah dan swasta.

Untuk kegiatan yang memiliki rasio kedua terbaik yaitu Pembuatan Naskah Pidato dengan kenaikan rasio terus menerus dari tahun 2007-2011, hal ini juga didukung oleh prosedur/mechanisme kegiatan yang dilaksanakan semakin mengarah kepada terkomunikasinya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, melalui Badan Koordinator Kehumasan (Bakohumas). Keberhasilan ini tercapai berkat adanya media massa/elektronik yang dikelola pemerintah dan swasta, dengan tantangan bahwa masih rendahnya pembinaan dan pelatihan kehumasan pada staf Bagian Humas.

**c. Bagian Organisasi**

Berdasarkan pada Tabel 2.1, di Bagian Organisasi pada kegiatan Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang sangat baik dengan kenaikan rasio terus menerus dari tahun 2007-2011, hal ini juga didukung oleh prosedur/mechanisme kegiatan yang dilaksanakan semakin mengarah kepada tertatanya Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah berdasarkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2008.

Keberhasilan ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerjasama yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai lembaga legislatif dengan dinamika rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Banda Aceh pasca gempa bumi dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 dirasakan perlu untuk menghapus 26 Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan potensi dan karakteristik daerah sejak tahun 1984 hingga 2004.

Untuk kegiatan yang memiliki rasio kedua terbaik yaitu Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dengan kenaikan rasio terus menerus dari tahun 2007-2011, hal ini juga didukung oleh regulasi terkait yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sehingga prosedur/mechanisme kegiatan yang dilaksanakan dapat diarahkan kepada tertatanya Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Namun demikian dengan masih rendahnya kompetensi pegawai dan pemahaman kelembagaan, perlu ditingkatkan pelatihan dalam rangka SDM yang profesional dengan melalui diklat teknis.

**d. Bagian Administrasi Perekonomian**

Berdasarkan pada Tabel 2.1, di Bagian Administrasi Perekonomian pada kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang sangat baik dengan kenaikan rasio terus menerus dari tahun 2010-2011, hal ini juga didukung oleh prosedur/mechanisme kegiatan yang dilaksanakan pada tersedianya data dan analisis data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Untuk kegiatan yang memiliki rasio negatif yaitu pembinaan dan pengendalian izin tempat usaha, pengendalian administrasi perpajakan, dan pendataan izin gangguan HO dengan penurunan rasio terus menerus dari tahun 2007-2011, hal ini disebabkan oleh tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan antara Bagian

Adm.Perekonomian dengan SKPD lain dan kurangnya koordinasi antar SKPD terkait. Diharapkan untuk periode kedepan perlu adanya kejelasan pembagian Tugas di Bidang Penanaman Modal sesuai Tugas dan fungsi masing-masing, Sinkronisasi koordinasi dan laporan secara berkala SKPD terkait dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota Banda secara berkala.

**e. Bagian Tata Pemerintahan**

Berdasarkan pada Tabel 2.1, di Bagian Tata Pemerintahan pada kegiatan Sertifikasi, Pemetaan, Pengukuran dan Pematokan Tanah Aset Pemerintah Kota memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang sangat baik dengan kenaikan rasio terus menerus dari tahun 2010-2011, hal ini juga didukung regulasi terkait yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, SDM dibidang pemetaan digital, dan partisipasi langsung gampong-gampong yang saling bersebelahan.

**f. Bagian Keistimewaan**

Berdasarkan pada Tabel 2.1, di Bagian Keistimewaan pada kegiatan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) memiliki rasio realisasi penyerapan anggaran yang buruk dengan penurunan rasio terus menerus dari tahun 2010-2011, hal ini diakibatkan efisiensi anggaran dengan telah dilakukannya koordinasi yang semakin baik dengan Dinas Syariat Islam, MPU, pihak Kecamatan.

Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -								Realisasi Capaian Tahun ke -								Rasio Capaian pada Tahun ke -							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas		80	20	40	60	80	100	100	100	80	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pemberitaan positif mengenai program Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)		0	0	0	0	0	7200	8640	10800	0	0	0	0	0	7200	8640	10800	0	0	0	0	0	100	100	100
3	Tersedianya regulasi yang efektif dan efisien		45	45	45	45	45	45	45	45	48	33	78	81	72	45	41	36	107	73	173	180	160	100	91	80
4	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)		0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	100	100

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-								Rata-rata Pertumbuhan	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-19	-20	-21	-22					-24	-25
<b>SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH</b>																										
Belanja Tidak Langsung	54,054,605,049	50,993,027,898	8,111,856,537	9,279,213,580	12,089,884,829	13,263,537,888	14,193,031,993	14,419,140,920	43,640,486,949	38,877,592,540	8,449,209,944	9,837,483,858	11,910,157,962	12,454,014,060	13,350,240,400	12,530,734,666	80.73	76.24	104.16	106.02	98.51	93.90	94.06	86.90	5.11	4.94
Belanja Pegawai	31,966,237,049	25,279,627,898	8,111,856,537	9,279,213,580	12,089,884,829	13,263,537,888	14,193,031,993	14,419,140,920	23,192,970,512	18,540,752,444	8,449,209,944	9,837,483,858	11,910,157,962	12,454,014,060	13,350,240,400	12,530,734,666	72.55	73.34	104.16	106.02	98.51	93.90	94.06	86.90	24.56	23.49
Belanja Hibah	3,000,000,000	2,350,000,000	0	0	0	0	0	0	2,707,550,000	2,080,448,265	0	0	0	0	0	0	90.25	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02
Belanja Bantuan Sosial	12,638,368,000	13,993,400,000	0	0	0	0	0	0	12,202,535,362	11,744,441,219	0	0	0	0	0	0	96.55	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.10
Belanja Bagi Hasil	5,000,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0	0	4,990,000,000	0	0	0	0	0	0	0	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.06
Belanja Bantuan Keuangan	450,000,000	7,920,000,000	0	0	0	0	0	0	450,000,000	6,227,380,612	0	0	0	0	0	0	100.00	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.42
Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	97,431,075	284,570,000	0	0	0	0	0	0	9.74	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.08
Belanja Langsung	90,849,145,490	77,271,773,863	21,259,289,947	19,698,570,906	23,600,856,294	27,684,983,071	39,912,341,877	46,881,055,142	83,482,530,633	70,749,245,965	17,437,987,284	18,051,535,841	22,144,184,398	25,262,657,827	37,586,686,204	43,660,081,243	86.65	86.95	84.14	90.69	94.99	93.12	94.70	92.95	22.10	22.61
Belanja Pegawai	6,501,960,250	5,942,099,579	4,504,664,000	3,719,041,000	4,228,225,980	4,859,400,000	6,130,240,000	4,723,935,000	5,528,033,500	4,932,636,691	3,924,215,606	3,494,416,607	3,970,768,273	4,645,476,145	5,758,960,048	4,239,898,637	85.02	83.01	87.11	93.96	93.91	95.60	93.94	89.75	7.76	7.77
Belanja Barang dan Jasa	22,590,289,140	22,917,578,784	14,369,245,847	14,767,678,906	17,063,920,652	16,362,125,716	20,464,065,097	26,776,574,250	17,342,858,656	18,229,132,901	11,475,790,363	13,507,223,234	15,916,017,125	14,446,770,398	18,627,065,155	24,281,511,416	76.77	79.54	79.86	91.46	93.27	88.29	91.02	90.68	29.66	28.51
Belanja Modal	61,756,896,100	48,412,095,500	2,385,380,100	1,211,851,000	2,308,709,662	6,463,457,355	13,318,036,780	15,380,545,892	60,611,638,477	47,587,476,373	2,037,981,315	1,049,896,000	2,257,399,000	6,170,411,284	13,200,661,001	15,138,671,190	98.15	98.30	85.44	86.64	97.78	95.47	99.12	88.43	28.89	31.54
<b>TOTAL</b>	<b>144,903,750,539</b>	<b>128,264,801,761</b>	<b>29,371,146,484</b>	<b>28,977,784,486</b>	<b>35,690,741,123</b>	<b>40,948,520,959</b>	<b>54,105,373,870</b>	<b>61,300,196,062</b>	<b>127,123,017,582</b>	<b>109,626,838,505</b>	<b>25,887,197,228</b>	<b>27,889,019,699</b>	<b>34,054,342,360</b>	<b>37,716,671,887</b>	<b>50,936,926,604</b>	<b>56,190,815,909</b>	<b>83.69</b>	<b>81.60</b>	<b>94.15</b>	<b>98.35</b>	<b>96.75</b>	<b>93.51</b>	<b>94.38</b>	<b>89.93</b>	<b>13.61</b>	<b>13.77</b>

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah. Pada akhir tahun 2011 secara bersama-sama dengan SKPD lainnya, predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) diraih Pemerintah Kota Banda Aceh berkat kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK Kota telah memiliki komitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan clean government

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Dalam rangka meningkatkan integritas dan kualitas aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat kemampuan untuk memahami konsep teknis analisis manajemen yang implikasinya dilakukan penjabaran kedalam penyelesaian tugas-tugas tertentu. Untuk menunjang tugas-tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh agar dapat melaksanakan pelayanan prima diperlukan langkah-langkah antara lain :

- Perlu memaksimalkan pendidikan diklat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian dilingkungan Sekretariat Daerah
- Perlu mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana guna memperlancar tugas-tugas
- Perlu peningkatan jenjang kependidikan minimal Sarjana sesuai kebutuhan
- Perlu upaya yang serius terhadap pembenahan manajemen kepegawaian
- Perlu meningkatkan tunjangan prestasi kerja berdasarkan produk/ hasil yang dilakukan sehingga mendorong aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan.

### **A. Peluang**

- a. Adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat
- b. Adanya dukungan masyarakat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terhadap program/kegiatan SKPD
- c. Adanya dukungan program dari pemerintah atasan
- d. Adanya Rencana Tata Ruang Pengembangan Wilayah
- e. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan teknologi.

### **B. Tantangan**

- a. Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan atasan langsung
- b. Kebutuhan dan sikap kritis masyarakat yang semakin tinggi
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sesuai bidang tugas memungkinkan terjadinya ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian tugas

- d. Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bagian dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Bagian terpenting dalam dokumen Renstra adalah analisis isu-isu strategis karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

##### **Permasalahan**

Permasalahan yang muncul pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh meliputi beberapa permasalahan yang dihadapi selama menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang mengemuka sebagai berikut :

1. Belum tuntasnya penyelesaian Tapal Batas Gampong
2. Belum tuntasnya penyelesaian regulasi reusam gampong
3. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat
4. Masih banyaknya lahan yang belum dibebaskan untuk kepentingan publik dan RTH
5. Kurangnya bantuan hukum kepada aparatur Pemerintah Kota
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Nasional dan daerah
7. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang legal drafting
8. Kurangnya kompetensi SDM dalam bidang kehumasan
9. Kurangnya peralatan kerja bidang kehumasan
10. Kurangnya propaganda kebijakan dan agenda pemerintah daerah
11. Belum tersedianya gedung penyimpanan arsip
12. Belum tersedianya database arsip digital
13. Belum ada keseragaman tata naskah dinas
14. Belum adanya tenaga ahli sandi (sandiman)
15. Kurangnya SDM yang memahami tugas keprotokolan
16. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi di Kota Banda Aceh

17. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap informasi bisnis di Kota Banda Aceh
18. Belum tersedianya data potensi daerah
19. Kurangnya sinergitas pelaksanaan tugas antar lembaga keistimewaan
20. Lemahnya pembinaan terhadap Qori/Qoriah
21. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap syiar agama
22. Rendahnya SDM yang memahami ANJAB dan ABK Rendahnya SDM yang memahami Kelembagaan
23. Masih rendahnya SKPD yang memiliki SPM dan SOP
24. Belum optimalnya pelaksanaan ANJAB dan ABK
25. Rendahnya SDM dibidang TI dan Pengadaan Barang Jasa
26. Belum optimalnya tanggapan SKPD terkait terhadap pengaduan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik
27. Masih rendahnya program pembinaan kepada masyarakat jasa konstruksi
28. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menunjang tugas operasional SKPD dan pelayanan Publik
29. Dokumen perencanaan belum sesuai dengan standar regulasi terbaru

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah : **Banda Aceh Model Kota Madani**. Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Sehingga isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan

terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**

**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Banda Aceh Model Kota Madani				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah</b>			
	<b>Bagian Keistimewaan</b>			
	1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Kurangnya sinergitas pelaksanaan tugas antar lembaga keistimewaan	Kurangnya SDM yang profesional dalam mengelola kelembagaan	Adanya Qanun Aceh dan Kota Banda Aceh ttg Lembaga Keistimewaan
	2. Program Pemberdayaan Sarana Ibadah	Lemahnya pembinaan terhadap Qori/Qoriah	Kurang aktifnya lembaga yang menangani pembinaan (LPTQ dan IPQAH)	Adanya event/Musabaqah Tilawatil Quran yang berjenjang (Tk. Kecamatan, Kota, Provinsi, Nasional, Internasional)
	3. Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam			
	4. Program Pembinaan Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Insaniah	Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap syiar agama	Rendahnya motivasi, kesadaran generasi muda dan lemahnya pengawasan orang tua	Adanya event untuk menyalurkan bakat dan kompetensi generasi muda
	5. Program Pengembangan Nilai Budaya			

2	<b>Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>			
<b>Bagian Umum</b>				
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Belum tersedianya gedung penyimpanan arsip	Belum tersedianya gedung, peralatan penyimpanan arsip dan aplikasi kearsipan	Adanya komitmen pemerintah kota	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum tersedianya database arsip digital	Belum tersedianya database arsip digital	Tersedianya diklat teknis	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Belum adanya tenaga ahli sandi (sandiman)	Belum adanya tenaga ahli sandi (sandiman)	Tersedianya diklat teknis	
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kurangnya SDM yang memahami tugas keprotokolan	Kurangnya pemahaman SDM terhadap keprotokolan	Tersedianya diklat teknis	
<b>Bagian Hukum</b>				
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Belum optimalnya pelayanan bantuan hukum kepada aparatur Pemerintah Kota	Kurangnya SDM yang profesional dlm menangani kasus hukum	Adanya komitmen pemerintah kota	
b. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Nasional dan daerah	Kurangnya SDM yang profesional dalam menangani kasus hukum	Adanya komitmen pemerintah kota	
c. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				
d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kurangnya tenaga ahli dalam bidang legal drafting	Kurangnya sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat	Adanya komitmen pemerintah kota	
e. Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan Publik				
<b>Bagian Organisasi</b>				
1. Program Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Belum ada keseragaman tata naskah dinas	Kurangnya SDM yang profesional dalam menangani tata naskah dinas	Adanya regulasi terkait	
2. Program Penataan				

	Peraturan Perundang-undangan		Rendahnya kompetensi pegawai	Tersedianya diklat teknis
	3. Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Rendahnya SDM yang memahami ANJAB dan ABK		
	4. Pendidikan Kedinasan	Rendahnya SDM yang memahami Kelembagaan	Terbatasnya kompetensi pegawai yang memahami kelembagaan	Tersedianya diklat teknis
	5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Masih rendahnya SKPD yang memiliki SPM dan SOP	Kurangnya pemahaman SKPD	Adanya regulasi terkait serta diklat kepada SKPD
6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota	Belum optimalnya pelaksanaan ANJAB dan ABK	Rendahnya pemahaman pegawai terhadap ANJAB dan ABK	Tersedianya diklat teknis	
<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>				
	1. Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Belum tuntasnya penyelesaian Tapal Batas Gampong	a. Sulitnya menyepakati batas antar gampong	Adanya komitmen pemerintah kota
			b. Rendahnya partisipasi masyarakat	
	2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Belum tuntasnya penyelesaian regulasi reusam gampong	Kurangnya pemahaman dan motivasi aparatur gampong	a. Adanya komitmen pemerintah kota
				b. Adanya tim evaluasi reusam gampong
	Camat belum optimal melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota	Belum adanya juknis dan juklak yg memadai	a. Adanya regulasi b. Tersedianya dana operasional	
	Masih banyaknya lahan yang belum dibebaskan untuk kepentingan publik dan RTH	Tingginya harga tanah	Adanya komitmen pemerintah kota	
<b>3.</b>	<b>Memperkuat Ekonomi Kerakyatan</b>			
	<b>Bagian Adm Perekonomian</b>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian</li> <li>2. Pengembangan Data/Informasi</li> <li>3. Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi</li> </ol>	<p>Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi di Kota Banda Aceh</p> <p>Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap informasi bisnis di Kota Banda Aceh</p> <p>Belum tersedianya data potensi daerah</p>	<p>Belum lengkapnya regulasi terhadap pelaksanaan investasi di Kota Banda Aceh</p> <p>Belum sinkronnya data investasi</p> <p>Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha</p> <p>Belum terkumpulnya data secara akurat</p>	<p>Banyaknya investor yang masuk</p> <p>Banda Aceh menjadi salah satu tujuan investasi</p> <p>Pertumbuhan dunia usaha terus meningkat</p> <p>Banyaknya potensi ekonomi di Kota Banda Aceh</p>
<b>4.</b>	<b>Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya</b>			
	<b>Bagian Humas</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah daerah</li> <li>3. Program kerjasama informasi dan Media Masa</li> </ol>	<p>Kurangnya kompetensi SDM dalam bidang kehumasan</p> <p>Kurangnya peralatan kerja bidang kehumasan</p> <p>Kurangnya propaganda kebijakan dan agenda pemerintah daerah</p>	<p>Belum adanya pembinaan dan pelatihan kehumasan</p> <p>Belum memadainya peralatan kerja</p> <p>Belum optimalnya propaganda melalui media</p>	<p>Banyaknya lembaga pelatihan profesional</p> <p>Adanya komitmen pemerintah kota</p> <p>Adanya media massa/elektronik yang dikelola oleh pemerintah dan swasta</p>
<b>5.</b>	<b>Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami</b>			
	<b>Bagian Adm Pembangunan</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi;</li> <li>2. Program Pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah</li> </ol>	<p>Rendahnya SDM dibidang TI dan Pengadaan Barang Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kompetensi pegawai dibidang IT</li> <li>2. Terbatasnya pegawai yang bersertifikat pengadaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Tersedianya diklat teknis</li> <li>1.b. Teknologi berkembang sangat pesat</li> <li>2.a. Adanya ULP dan LPSE</li> <li>b. Adanya regulasi</li> </ol>

	3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Belum optimalnya tanggapan SKPD terkait pengaduan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik	Rendahnya kesadaran partisipasi SKPD	a. Adanya UU KIP b. Adanya komitmen pimpinan
	4. Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat jasa konstruksi	Rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi	a. Adanya Peraturan
	5. Program Pengembangan Data dan Informasi			b. Tuntutan persaingan yang kompetitif dikalangan masyarakat jasa konstruksi
	6. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menunjang tugas operasional SKPD dan pelayanan Publik	Rendahnya kesadaran SKPD	a. Kemajuan teknologi yang sangat cepat b. Tuntutan kualitas pelayan publik yang semakin tinggi
		Dokumen perencanaan belum sesuai dengan standar regulasi terbaru	Dokumen perencanaan tidak terkait langsung dengan dokumen anggaran	Adanya PP dan Permendagri tentang dokumen perencanaan
6.	<b>Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik Dan Perlindungan Anak</b>			
7.	<b>Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota</b>			

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

### 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai amanah Pasal 5 ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh kedepan bila ditinjau dari implikasi RTRW diantaranya :

- a. Belum tuntasnya penyelesaian tapal batas gampong;
  - b. Belum tuntasnya penyelesaian regulasi reusam gampong;
  - c. Masih banyaknya lahan yang belum dibebaskan untuk kepentingan publik dan RTH
- Kebutuhan akan ruang terbuka hijau juga menjadi fokus dalam RTRW Kota Banda Aceh.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan SKPD ada beberapa isu-isu strategis yang mengemuka sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur pada bidang keahlian tertentu
2. Masih rendahnya investasi di Kota Banda Aceh
3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan regulasi
4. Kurangnya propaganda kebijakan dan agenda pemerintah daerah
5. Kurangnya bantuan hukum kepada aparatur Pemerintah Kota
6. Belum tersedianya database arsip digital
7. Kurangnya sinergitas pelaksanaan tugas antar lembaga keistimewaan
8. Belum optimalnya tanggapan SKPD terkait terhadap pengaduan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menunjang tugas operasional SKPD dan pelayanan Publik.

Berdasarkan isu-isu tersebut dimana Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian menjadi fungsi dan urusan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu strategis adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi. Visi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 adalah :

“ Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas dengan SDM profesional untuk mendukung model Kota Madani”.

Berkualitas maksudnya barang-barang publik (publik goods) yang dihasilkan berupa jasa, proses dan penciptaan lingkungan yang kondusif yang diberikan dalam rangka mendukung pelayanan administrasi yang diberikan sehingga memenuhi harapan dari masyarakat (publik). Berkualitas merupakan fungsi dari : SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan produktif, yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Profesional maksudnya adalah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, sumber daya manusia yang ada akan mampu menghasilkan jasa, proses dan penciptaan lingkungan yang kondusif dalam rangka mendukung administrasi bagi penyediaan layanan sesuai dengan harapan dari pengguna jasa pelayanan (masyarakat). Profesional disini diharapkan mampu menjawab perlunya peningkatan dimensi kualitas.

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan , yaitu :

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang transparan dan akuntabel

Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi

Mewujudkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintahan

Mengembangkan SDM yang profesional dan islami

Mengoptimalkan peluang investasi dan daya saing daerah

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menciptakan tertib administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan dan laporan pertanggungjawaban serta laporan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan Renstra	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran cepat, tepat dan mudah	90%	90%	90%	90%	90%

			Tersedianya Tata Naskah dinas dilingkungan Pemko	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi	-	-	80%	85%	90%
			Persentase penyelesaian tapal batas	80%	80%	85%	90%	90%
			Persentase jumlah tanah pemko yang telah disertifikasi	80%	80%	85%	90%	90%
		Meningkatkan penyebarluasan informasi dan publikasi kebijakan/kegiatan KDH/WKDH dan daerah	Jumlah penyebarluasan informasi dan publikasi kebijakan/kegiatan KDH/WKDH/daerah melalui berbagai media	90%	90%	90%	90%	90%

			Persentase pemberitaan media terkait kebijakan/ kegiatan KDH/WKDH dan daerah	90%	90%	90%	90%	90%
2	Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Terwujudnya Clean Government	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi untuk operasional Satuan Kerja dan layanan publik. (aplikasi e-government)	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem pengawasan internal secara efektif	2.1 Terlaksananya sistem penilaian kinerja PNS yang objektif, transparan, efektif, efisien dan akuntabel	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi dan tepat ukuran	3.1 Persentase penataan kelembagaan sesuai dengan peraturan per Undang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah SKPD yang telah menyusun	90%	90%	90%	90%	90%

			Tupoksi dan Uraian Tugas					
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan survey IKM	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase jumlah SKPD yang telah menyusun SOP	90%	90%	90%	90%	90%
			Tersedianya dokumen Anjab dan ABK	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang optimal untuk mendukung pelayanan dan kinerja aparatur	4.1. Persentase jumlah SKPD yang telah menerapkan program e-kinerja	70%	80%	95%	95%	95%
			4.2. Persentase layanan yang	90%	90%	90%	90%	90%

			diberikan melalui sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik					
			4.3. Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk serta ditindaklanjuti di LPM	90%	90%	90%	90%	90%
			4.4. Jumlah peraturan/kebijakan yang dipublikasikan secara elektronik	90%	90%	90%	90%	90%
3	Meningkatkan koordinasi terpadu dalam perumusan kebijakan	Terlaksananya koordinasi antar bagian, dan antar SKPD dalam perumusan kebijakan	Persentase produk hukum yang aspiratif	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase draft Ragan menjadi Ragan yang diajukan ke DPRK	90%	90%	90%	90%	90%
			Frekuensi monitoring dan evaluasi	90%	90%	90%	90%	90%

			pengendalian kegiatan pembangunan					
			Frekuensi rapat koordinasi antar SKPD dilingkungan Pemko Banda Aceh	90%	90%	90%	95%	95%
		Mengembangkan koordinasi antar lembaga daerah dan pusat	Frekuensi rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	90%	90%	90%	95%	95%
			Frekuensi rapat koordinasi dengan unsur Muspida dan masyarakat	90%	90%	90%	95%	95%
4	Meningkatkan SDM Masyarakat dan Aparatur yang islami	Meningkatnya SDM Masyarakat yang islami	Jumlah kegiatan dan event pemilihan anak saleh	95%	95%	95%	95%	95%

			Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kompetensi Aparatur Pemerintahan yang islami	Ada tidaknya reward dan punishment secara optimal	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat perjenjangan	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase PNS yang lulus dalam ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa	90%	90%	90%	90%	90%

5	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan potensi daerah	1. Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, produk unggulan dan potensi daerah	Jumlah kerjasama pemerintah kota dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, BUMN/BUMD dan sektor swasta serta luar negeri	90%	90%	90%	90%	90%
			Tersedianya database perekonomian Kota Banda Aceh	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah regulasi yang mendukung peluang Investasi	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah data peluang investasi yang dipromosikan	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatkan kompetensi pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mampu bersaing ditingkat regional dan nasional	90%	90%	90%	90%	90%

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 bertujuan untuk mewujudkan Pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas dengan SDM profesional untuk mendukung model Kota Madani. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
----	--------	---------	----------	----------------

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang transparan dan akuntabel

1.	Menciptakan tertib administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan dan laporan pertanggungjawaban serta laporan keuangan	Menyelenggarakan diklat teknis bagi aparatur sesuai bidang tugas	Meningkatkan profesionalisme aparatur
		Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal	Mengoptimalkan kualitas aparatur pelayanan publik	Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan publik
		Meningkatkan penyebarluasan informasi dan publikasi kebijakan/ kegiatan KDH/WKDH dan daerah	Melakukan kerjasama dengan media massa	Koordinasi dengan berbagai media

Misi II : Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi

2.	Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Terwujudnya Clean Government	Menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis TIK  Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab	Pengembangan sistem TIK secara terpadu dan terintegrasi  Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pemerintah dalam peningkatan pelayanan
----	------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		2. Terlaksananya sistem pengawasan internal secara efektif	Mengoptimalkan kualitas aparatur pengawas	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas
--	--	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------

Misi III : Mewujudkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintahan

3.	Meningkatkan koordinasi terpadu dalam perumusan kebijakan	Terlaksananya koordinasi antar bagian dan antar SKPD dalam perumusan kebijakan	Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi SKPD dalam perumusan produk hukum daerah  Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan	Menyusun Peraturan Walikota Banda Aceh tentang koordinasi antar SKPD dalam perumusan kebijakan dan produk hukum daerah  Menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian kegiatan pembangunan
----	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misi IV : Mengembangkan SDM yang profesional dan islami

4.	Meningkatkan SDM masyarakat dan aparatur yang islami	Meningkatnya SDM masyarakat yang islami  Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan yang islami	Meningkatkan SDM aparatur pemerintah yang profesionalime	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima
----	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

		Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang memiliki Kompetensi, Kompetitif, Amanah, Profesional dan Bertanggung Jawab	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kemampuan diri (self capacity)	Menyusun peraturan walikota Banda Aceh tentang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Misi V : Mengoptimalkan peluang investasi dan daya saing daerah

5.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan potensi daerah	<p>1. Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, produk unggulan dan potensi daerah</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha</p>	<p>- Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan modal usaha</p> <p>- Peningkatan Kerjasama dengan Investor</p> <p>- Peningkatan Kerjasama dengan pelaku usaha</p>	<p>- Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan</p> <p>- Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah</p> <p>- Membentuk forum kemitraan pelaku usaha</p>
----	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing sebuah organisasi yang sangat diperlukan adalah penilaian terhadap kondisi organisasi tersebut dan lingkungan sekitarnya, penilaian ini dapat dilakukan melalui Analisis SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal organisasi (strengths dan weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (opportunities dan threats), maka kekuatan, peluang dan ancaman yang melekat baik pada pemerintah maupun masyarakat Kota Banda Aceh dapat diidentifikasi menjadi :

Internal : analisis terhadap lingkungan internal Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

#### Analisis SWOT

##### Kekuatan (Strengths)

Tersedianya sistem teknologi informasi menuju e-government

Jumlah pegawai yang memadai

Tugas pokok dan fungsi organisasi yang jelas

Sarana dan prasarana kerja yang memadai

Komitmen yang tinggi dari pimpinan.

##### 4.3.2 Kelemahan (Weakness)

Kualitas SDM belum optimal

Pelayanan aparatur belum optimal

Masih rendahnya koordinasi internal dan eksternal

Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward dan punishment di lingkungan organisasi

Tidak tersedianya data yang lengkap dan akurat

Eksternal : analisis terhadap lingkungan eksternal Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

##### Peluang (Opportunity)

Adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat

Adanya dukungan masyarakat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terhadap program/kegiatan SKPD

Adanya dukungan program dari pemerintah atasan

Adanya Rencana Tata Ruang Pengembangan Wilayah

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan teknologi.

##### 4.3.4 Ancaman (Threats)

Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan atasan langsung

Kebutuhan dan sikap kritis masyarakat yang semakin tinggi

#### Tabel SWOT

	Kekuatan (Stengths)	Kelemahan (Weaknees)
Internal	<p>Tersedianya sistem teknologi informasi menuju e-government</p> <p>Jumlah pegawai yang memadai</p> <p>Tugas pokok dan fungsi organisasi yang jelas</p> <p>Sarana dan prasarana kerja yang memadai</p> <p>Komitmen yang tinggi dari pimpinan.</p>	<p>Kualitas SDM belum optimal</p> <p>Pelayanan aparatur belum optimal</p> <p>Masih rendahnya koordinasi internal dan eksternal</p> <p>Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward dan punishment di lingkungan organisasi</p> <p>Tidak tersedianya data yang lengkap dan akurat</p>
Eksternal		
Peluang (Opportunities)	SO	WO
<p>Adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat</p> <p>Adanya dukungan masyarakat, pemerintah propinsi dan pemerintah</p>	<p>1. Membangun kota Banda Aceh sebagai ibu kota Pemerintah Aceh sesuai dengan rencana tata ruang pengembangan wilayah.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan kota Banda</p>	<p>1. Meningkatkan SDM aparatur pemerintahan dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat</p>

<p>pusat terhadap program/kegiatan SKPD</p> <p>Adanya dukungan program dari pemerintah atasan</p> <p>Adanya Rencana Tata Ruang Pengembangan Wilayah</p>	<p>Aceh yang lebih baik berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai daerah otonom.</p> <p>3. Memaksimalkan fungsi Sekretariat Daerah Kota untuk pengkoordinasian pelaksanaan tugas dmas daerah dan lembaga teknis daerah</p> <p>4. Menggunakan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tupoksi Sekretariat Daerah Kota</p> <p>5. Meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota melalui dukungan KDH</p> <p>6. Memaksimalkan penggunaan sistem teknologi informasi menuju e-government dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi</p>	<p>2. Mengoptimalkan pelayanan aparatur dan pembangunan kelembagaan melalui pembangunan kapasitas</p> <p>3. Meningkatkan pengembangan wilayah dengan bantuan dan pihak ketiga/negara donor</p> <p>5. Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward dan punishment</p> <p>6. Melakukann identifikasi bentuk reward dan punishment yang akan diberikan</p> <p>7. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan secara optimal dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan teknologi.</p>
<p>Ancaman (Threats)</p>	<p>ST</p>	<p>WT</p>
<p>Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan atasan langsung</p> <p>Kebutuhan dan sikap kritis masyarakat yang semakin tinggi</p>	<p>Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang</p> <p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pembangunan dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang semakin tinggi.</p> <p>Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal guna memenuhi kebutuhan dan menghadapi sikap kritis masyarakat yang semakin tinggi</p> <p>2. Melakukan perencanaan tata ruang yang baik untuk menyikapi kebutuhan</p>

	<p>koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan lintas sektora</p>	<p>masyarakat dalam hal pelayanan publik</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan pelayanan aparatur secara optimal</p> <p>5. Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### A. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan tertentu.

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2012-2017 disusun berdasarkan Bagian masing-masing yaitu :

#### BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan Data dan Informasi

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

#### BAGIAN HUMAS

Program Kerjasama Informasi Media Massa

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

#### BAGIAN UMUM

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

#### BAGIAN HUKUM

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan Publik

#### BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

#### BAGIAN ORGANISASI

Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kota

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pengembangan Kapasitas Kota

#### BAGIAN KEISTIMEWAAN

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah

Program Pengembangan Mu'amalah  
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah  
Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam  
Program Pemberdayaan Sarana Ibadah  
Program Penyemarakkan Syiar Islam  
Program pembinaan dan pengembangan syariat islam  
Program pemberdayaan sarana ibadah

#### BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah  
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  
Program Pengembangan data/informasi  
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,  
 dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh  
 Provinsi Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2012	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 2013		Tahun-2 2014		Tahun-3 2015		Tahun-4 2016		Tahun-5 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																				
	1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan	1.1.1 Jumlah dokumen perencanaan tahunan		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan kemampuan SDM dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Jajaran	100%	100 %	419.112.500	100 %	62.416.875	100 %	532.497.500	100 %	337.987.500	100 %	354.886.875	100 %	354.886.875	Bagian Administrasi Pembangunan	

1. Menciptakan tertib administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	dan laporan pertanggungjawaban serta laporan keuangan	dan Renstra 1.1.2 Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan																
	Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal	1.2.1 Terselesaikan kegiatan administrasi perkantoran cepat, tepat dan mudah	Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibidang pengadaan barang/jasa secara elektronik	39 SKPD	39 SKPD	45,162,500	39 SKPD	33.916.875	39 SKPD	22.547.500	39 SKPD	60.987.500	39 SKPD	64.036.875	39 SKPD	64.036.875	Bagian Administrasi Pembangunan
			Kegiatan Layanan Penguatan Kelembagaan Secara Elektronik e-kinerja	Jumlah efektifitas dan efisiensi penyusunan ANJAB/ABK	4 SKPD	8 SKPD	373,950,000	6 SKPD	258,500,000	6 SKPD	509,950,000	6 SKPD	277,000,000	6 SKPD	290.850.000	6 SKPD	290.850.000	Bagian Administrasi Pembangunan

		1.2.2	Tersedia			Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Peningkatan Pengendalian Program Pembangunan di SKPD	100%	100%	366,100,000	100%	93.325.000	100%	246,215.000	100%	73,374,600	100%	77.043.330	100%	77.043.330	Bagian Administrasi Pembangunan
		1.2.3	Persentase pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi			Kegiatan pelaporan program pembangunan	Jumlah Laporan RFK Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan, Monev PBJ di Jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh serta Aplikasi DAMS	38 SKPD	39 SKPD dan laporan Monev PBJ	366,100,000	39 SKPD dan laporan Monev PBJ	93.325.000	39 SKPD dan laporan Monev PBJ	246.215.000	38 SKPD	73.374.600	38 SKPD	77.043.330	38 SKPD	77.043.330	Bagian Administrasi Pembangunan
		1.2.4	Persentase penyelesaian			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi	Terwujudnya Sarana dan Prasarana serta meningkatnya SDM Aparatur	100%	100%	908,163,000	100%	1.463.807.400	100%	4.430.049.500	100%	1,017,005,960	100%	1.067.856.258	100%	1.067.856.258	Bagian Administrasi Pembangunan

		tapal batas			dan Media Massa	Pemerintahan di Bidang TIK														
		1.2.5 Persentase jumlah tanah pemko yang telah disertifikasi			Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana serta Kemampuan SDM Aparatur di Bidang TIK	4 orang	4 orang	908,163,000	4 Orang	1.463.807.400	4 Orang	4.430.049.500	4 orang	1,017,005,960	4 orang	1.067.856.258	4 orang	1.067.856.258	Bagian Administrasi Pembangunan
1.3 Meningkatkan penyediaan informasi dan publikasi kebijakan/kegiatan KDH/WK DH dan daerah		1.3.1 Jumlah penyediaan informasi dan publikasi kebijakan/kegiatan KDH/WK DH/daerah			Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketertampilan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	100 %	100 %	106,802,500	100 %	112.452.500	100%	58.958.900	100 %	60,421,400	100%	63.442.470	100%	63.442.470	Bagian Administrasi Pembangunan
					Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan Bintek Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	200 Orang	200 Orang	106,802,500	200 orang	112.452.500	200 orang	58.958.900	200 orang	60,421,400	200 orang	63.442.470	200 orang	63.442.470	Bagian Administrasi Pembangunan

2.1 Terwujudnya Clean Government	melalui berbagai media 1.3.2 Persentase pemberitaan media terkait kebijakan/kegiatan KDH/WKDH dan daerah		Program Pengembangan Data dan Informasi	Ketersediaan data dan informasi perencanaan	-	-	0	-	0	1 Dok	150.000.000	-	0	-	0	1 Dok	0	Bagian Administrasi Pembangunan
			Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Buku Renstra SKPD	-	-	0	-	0	1 Dok	150.000.000	-	0	-	0	1 Dok	0	Bagian Administrasi Pembangunan
			Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama Pemerintah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Administrasi Pembangunan
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Administrasi Pembangunan
	2.1.1 Optimalisasi Pemanfaatan		JUMLAH			1,800,178,000		1,962,001,775		5,417,720,900		1,488,789,460		1,563,228,933		1,563,228,933	Bagian Administrasi	

2. Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	2.2 Terlaksananya sistem pengawasan internal secara efektif	Teknologi informasi untuk operasional Satuan Kerja dan layanan publik. (aplikasi e-government)																	Pembangunan
		BAGIAN HUMAS																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Tercapainya penyusunan pidato Kepala Daerah	100%	100%	788,805.000	100%	674.070.000	100%	118.175.000	100%	83.940.000	100%	88.137.000	100%	88.137.000	Bagian Humas		
		Pembuatan Naskah Pidato	Jumlah naskah pidato kepala daerah yang sudah disusun	300 buah	300 buah	788,805.000	1500 buah	674.070.000	1600 buah	118.175.000	1600 buah	83.940.000	1600 buah	88.137.000	1600 buah	88.137.000	Bagian Humas		
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Media	100%	100%	1.948.547.300	100%	2.873.235.500	100%	4.006.842.829	100%	2.497.555.829	100%	2.622.433.620	100%	2.622.433.620	Bagian Humas		
		Penyebarluasan informasi penyeleng	Jumlah Media yang menyebarkan informasi	40 media	38 Media	1.948.547.300	58 media	2.873.235.500	60 media	3.106.942.829	60 media	1.635.805.829	60 media	1.717.596.120	60 media	1.717.596.120	Bagian Humas		

2.3 Terwujudnya Organisasi dan Tata laksana yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan peraturan perundang-undangan	an, efektif, efisien dan akuntabel			Pemerintah Kota																
					Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Media yang menyebarkan Informasi Pembangunan Daerah	media	media	-	media			899.900.000	2 jurnal	861.750.000	4 jurnal	904.837.500	4 jurnal	904.837.500	Bagian Humas
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	100%	126.380.000	100%	158.480.000	100%	198.312.000	100%	152.624.000	100%	160.255.200	100%	160.255.200	Bagian Humas
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk KDH, WKDH dan Aparatur	20 bahan bacaan	22 Jenis Bahan Bacaan	126.380.000	35 bahan bacaan	158.480.000	37 bahan bacaan	198.312.000	37 bahan bacaan	152.624.000	37 bahan bacaan	160.255.200	37 bahan bacaan	160.255.200	Bagian Humas
2.3.2 Jumlah SKPD yang				JUMLAH		2,863,782,300	3,705,785,500	4,323,329,829	2,734,119,829	2,870,825,820	2,870,825,820	2,870,825,820	2,870,825,820	Bagian Humas						

		telah menyusun																
		Tupoksi dan Uraian Tugas	BAGIAN UMUM															
	2.3.3	Program pelayanan administrasi perkantoran	Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 bulan	12.894.471.925	12 bulan	16.399.646.050	12 bulan	18.350.585.950	12 bulan	13.485.843.550	12 bulan	14.160.135.728	12 bulan	14.160.135.728	Bagian Umum	
	Persentase SKPD yang telah melaksanakan survey IKM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat-menyerurat	12 bulan	12 bulan	58.550.000	12 bulan	59.350.000	12 bulan	67.450.000	12 bulan	42.310.000	12 bulan	44.425.500	12 bulan	44.425.500	Bagian Umum	
	2.3.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik dan SDA	12 bulan	12 bulan	1.827.475.000	12 bulan	2.041.060.000	12 bulan	2.224.775.000	12 bulan	1.778.585.000	12 bulan	1.867.514.250	12 bulan	1.867.514.250	Bagian Umum	
	Persentase jumlah SKPD yang telah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	488.250.500	12 bulan	561.801.500	12 bulan	566.226.000	12 bulan	688.217.000	12 bulan	701.627.850	12 bulan	701.627.850	Bagian Umum	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	532.221.800	12 bulan	636.636.150	12 bulan	605.009.050	12 bulan	467.676.650	12 bulan	491.060.483	12 bulan	491.060.483	Bagian Umum	

2.4 Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang optimal untuk mendukung	2.4.1 Persentase jumlah SKPD yang telah menerapkan program e-kinerja	menyusun SOP	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	143.473.625	12 bulan	188.101.400	12 bulan	198.270.900	12 bulan	140.770.900	12 bulan	147.809.445	12 bulan	147.809.445	Bagian Umum
		2.3.5 Tersedianya dokumen Anjamban ABK	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	127.700.000	12 bulan	153.700.000	12 bulan	260.950.000	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	Bagian Umum
		2.4.1 Persentase jumlah SKPD yang telah menerapkan program e-kinerja	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	1.697.886.000	12 bulan	1.811.864.000	12 bulan	3.394.680.000	12 bulan	1.937.850.000	12 bulan	2.034.742.500	12 bulan	2.034.742.500	Bagian Umum
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian Peralatan Rumah Tangga	3 bulan	3 bulan	538.800.000	3 bulan	1.667.900.000	3 bulan	774.000.000	3 bulan	116.000.000	3 bulan	121.800.000	3 bulan	121.800.000	Bagian Umum
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	142.400.000	12 bulan	143.560.000	12 bulan	140.190.000	12 bulan	124.600.000	12 bulan	130.830.000	12 bulan	130.830.000	Bagian Umum

pelayanan dan kinerja aparatur	2.4.2 Persentase layanan yang diberikan melalui sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik			Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembelian makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	3.300.715.000	12 bulan	4.010.393.000	12 bulan	3.794.935.000	12 bulan	3.665.100.000	12 bulan	3.848.355.000	12 bulan	3.848.355.000	Bagian Umum
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembiayaan rapat – rapat Koordinasi perjalanan ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	2.711.500.000	12 bulan	3.611.500.000	12 bulan	4.781.500.000	12 bulan	2.756.900.000	12 bulan	2.894.745.000	12 bulan	2.894.745.000	Bagian Umum
				Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang	Pembayaran Jasa Pelelangan / pengadaan barang dan jasa	12 bulan	12 bulan	18.750.000	10 bulan	18.750.000	10 bulan	19.750.000	10 bulan	11.850.000	10 bulan	12.442.500	10 bulan	12.442.500	Bagian Umum
	2.4.3 Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk serta ditindakl			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pembayaran biaya lembur pegawai /pembayaran Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.306.750.000	12 bulan	1.336.550.000	12 bulan	1.522.850.000	12 bulan	1.573.360.000	12 bulan	1.652.028.000	12 bulan	1.652.028.000	Bagian Umum

3. Meningkatkan koordinasi terpadu dalam	3.1 Terlaksananya koordinasi	anjuti di LPM		Penyediaan /Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	12 bln	50.000.000		52.500.000		52.500.000	Bagian Umum		
		2.4.4 Jumlah peraturan/kebijakan yang dipublikasikan secara elektronik		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	12 bulan	3.405.012.800	12 bln	5.052.827.000	12 bln	4.140.274.000	12 bln	2.782.795.000	12 bln	2.921.934.750	12 bln	2.921.934.750	Bagian Umum
				Pembangunan Rumah Jabatan	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Jabatan.	1 Kegiatan	1 Keg	41.000.000	1 keg.	180.000.000	1 keg.	173.000.000	1 keg.	30.000.000	1 keg.	31.500.000	1 keg.	31.500.000	Bagian Umum
		3.1.1 Persentase produk hukum yang aspiratif		Pembangunan Gedung Kantor	Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor.	1 Kegiatan	1 Keg	226.000.000	1 keg.	100.000.000	1 keg.	105.000.000	1 keg.	185.000.000	1 keg.	194.250.000	1 keg.	194.250.000	Bagian Umum
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Pembelian perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 bulan	12 bulan	28.200.000	12 bulan	31.350.000	12 bulan	45.250.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	31.500.000	12 bulan	31.500.000	Bagian Umum

perumusan kebijakan	asi antar bagian, dan antar SKPD dalam perumusan kebijakan	3.1.2 Presentase draft Raqan menjadi Raqan yang diajukan ke DPRK	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembelian perlengkapan Gedung Kantor.	12 bulan	12 bulan	150.170.000	12 bulan	961.530.000	12 bulan	648.612.500	12 bulan	85.650.000	12 bulan	89.932.500	12 bulan	89.932.500	Bagian Umum
			Pengadaan Mebeleur	Pembelian Mebeleur di Sekretariat	6 bulan	6 bulan	199.960.000	6 bulan	275.360.000	6 bulan	161.525.000	6 bulan	6.300.000	6 bulan	6.615.000	6 bulan	6.615.000	Bagian Umum
		3.1.3 Frekuensi monitoring dan evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rumah Jabatan	12 bulan	12 bulan	458.400.000	12 bulan	886.800.000	12 bulan	282.200.000	12 bulan	263.700.000	12 bulan	276.885.000	12 bulan	276.885.000	Bagian Umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	372.500.000	12 bulan	432.300.000	12 bulan	456.616.500	12 bulan	303.000.000	12 bulan	318.150.000	12 bulan	318.150.000	Bagian Umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	1.666.782.800	12 bulan	1.828.095.000	12 bulan	1.928.110.000	12 bulan	1.502.941.000	12 bulan	1.578.088.050	12 bulan	1.578.088.050	Bagian Umum

3.2 Menge m bangkan koordin	3.1.4 Frekuen si rapat koordin asi antar SKPD dilingku ngan Pemko Banda Aceh			Pemelihara an Rutin/Berka la Perlengkap an Gedung kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12 bula n	262.000. 000	12 bula n	357.392. 000	12 bulan	339.960. 000	12 bula n	376.204. 000	12 bulan	395.014.2 00	12 bulan	395.014. 200	Bagian Umum
				Program Peningkata n Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	6 bulan	6 bula n	447.500. 000	6 bln	425.250. 000	6 bln	410.500. 000	6 bln	311.100. 000	6 bln	326.655.0 00	6 bln	326.655. 000	Bagian Umum
				Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkap annya	Jumlah pakaian Dinas Pegawai yang disediakan	6 bulan	6 bula n	213.400. 000	6 bula n	197.600. 000	6 bulan	238.850. 000	6 bula n	163.100. 000	6 bulan	171.255.0 00	6 bulan	171.255. 000	Bagian Umum
	3.2.1 Frekuen si rapat koordin asi dengan pemerin tah pusat dan pemerin tah			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan.	6 bulan	6 bula n	37.300.0 00	6 bula n	47.650.0 00	6 bulan	52.150.0 00	6 bula n	44.000.0 00	6 bulan	46.200.00 0	6 bulan	46.200.0 00	Bagian Umum
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari – hari tertentu untuk kepala Daerah yang disediakan	6 bulan	6 bula n	196.800. 000	6 bula n	180.000. 000	6 bulan	119.500. 000	6 bula n	104.000. 000	6 bulan	109.200.0 00	6 bulan	109.200. 000	Bagian Umum

4. Meningkatkan SDM Masyarakat dan Aparatur	asi antar lembaga daerah dan pusat	daerah lainnya	3.2.2 Frekuensi rapat koordinasi dengan unsur Muspida dan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	30.000.000	12 bln	31.500.000	12 bln	31.500.000	Bagian Umum
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bln	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	31.500.000	12 bulan	31.500.000	Bagian Umum
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/WK DH	12 bulan	12 bulan	1.026.100.000	12 bln	1.017.800.000	12 bln	1.190.600.000	12 bln	3.434.450.000	12 bln	3.606.172.500	12 bln	3.606.172.500	Bagian Umum
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non	Jumlah Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen	12 bulan	12 bulan	120.100.000	12 bln	115.100.000	12 bulan	301.400.000	12 bulan	905.050.000	12 bulan	950.302.500	12 bulan	950.302.500	Bagian Umum
	4.1 Meningkatkan	4.1.1 Jumlah kegiatan dan event pemilihan anak saleh																	

yang islami	nya SDM Masyara kat yang islami	4.1.2 Jumlah fasilitasi kegiatan keagam aan		Departeme n dan Luar Negeri	dan Luar Negeri.															
				Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Pimpinan Daerah dengan MUSPIDA	12 bulan	12 bula n	642.000. 000	12 bula n	675.700. 000	12 bulan	647.000. 000	12 bula n	560.000. 000	12 bulan	588.000.0 00	12 bulan	588.000. 000	Bagian Umum	
				4.2.1 Ada tidaknya reward dan punishm ent secara optimal	Kunjungan Kerja/Inspe ksi Kepala Daerah/Wa kil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan publikasi	12 bulan	12 bula n	140.000. 000	bula n	0	12 bulan	0	- 0	0	12 bulan	0	12 bulan	0	Bagian Umum
	4.2 Meningk at nya kompet en si Aparatu r Pemerin tahan yang islami	4.2.2 Persenta se jumlah pegawai yang		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 bulan	12 bula n	124.000. 000	12 bula n	227.000. 000	12 bulan	242.200. 000	12 bula n	1.969.40 0.000	12 bulan	2.067.870 .000	12 bulan	2.067.87 0.000	Bagian Umum	



5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan potensi daerah	5.1 Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, produk unggulan dan	barang dan jasa			Daerah Tentang Penataan Kelembagaan SKPD dan Non SKPD	Daerah tentang penataan Kelembagaan SKPD dan Non SKPD														
		5.1.1 Jumlah kerjasama pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/ BUMD dan sektor swasta serta			Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pemerintahan	Meningkatnya Kualitas tenaga PPNS yang profesional	100 %	100 %	33.940.100	100 %	86.940.100	100%	87.560.000	100 %	37.418.960	100%	39.289.908	100%	39.289.908	Bagian Hukum
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah tenaga PPNS yang profesional	7 orang PPNS	7 orang PPNS	33.940.100	7 orang PPNS	36.940.100	7 orang PPNS	27.447.000	7 orang PPNS	37.418.960	7 orang PPNS	39.289.908	7 orang PPNS	39.289.908	Bagian Hukum
					Pendidikan/ pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyidik Pegawai	orang	orang	0	orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

potensi daerah	luar negeri																					
		5.1.2 Tersedianya database perekonomian Kota Banda Aceh	Rekrutmen dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Profesional.	2 orang	2 orang	0	2 orang	50.000.000	2 orang	60.113.000	0										Bagian Hukum
		5.1.3 Jumlah regulasi yang mendukung peluang Investasi	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum bagi Aparatur Pemerintah Kota	100 %	100 %	352.178.700	100 %	683.999.450	100%	498.358.000	100 %	369.708.000	100%	388.193.400	100%	388.193.400					
5.1.4 Jumlah	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan	Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan	5 kasus	5 kasus	352.178.700	5 kasus	683.999.450	5 kasus	498.358.000	5 kasus	369.708.000	5 kasus	388.193.400	5 kasus	388.193.400							Bagian Hukum

		data peluang investasi yang dipromosikan			pemerintah daerah	Pemerintah Daerah.														
		5.2.1 Jumlah pelaku usaha yang mampu bersaing ditingkat regional dan nasional			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Qanun dan Peraturan Walikota yang dipublikasi melalui IT	100 %	100 %	75.285.850	100 %	63.056.400	100%	128.276.500	100 %	89.176.500	100%	93.635.325	100%	93.635.325	Bagian Hukum
					Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum	Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Qanun dan Peraturan Walikota Banda Aceh	45 Buah	45 Buah	75.285.850	45 Buah	63.056.400	45 Buah	128.276.500	45 Buah	89.176.500	45 Buah	93.635.325	45 Buah	93.635.325	Bagian Hukum
					Sosialisasi Produk Hukum	Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	-		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Hukum
					Penyuluhan Hukum bagi Aparatur dan Publik	Pemahaman aparatur dan publik	-		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Hukum
	5.2 Meningkatkan kompetensi pelaku usaha																			



					Evaluasi Reusam Gampong	Jumlah Reusam Gampong tersedia.	Jenis Reusam	6 Jenis Reusam	40.000.000	6 Jenis Reusam	34.292.800	6 Jenis Reusam	36.420.800	6 Jenis Reusam	37.420.800	6 Jenis Reusam	39.291.840	6 Jenis Reusam	39.291.840	Bagian Tapem
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya buku laporan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat	100 %	100 %	214.243.701	100 %	290.629.734	100%	309.674.3000	100 %	282.149.300	100%	296.256.765	100%	296.256.765	Bagian Tapem
					Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah	Jumlah Buku LKPJ dan LPPD Kepala Daerah	buku	buku	143.821.938	4 buku	183.800.986	5 buku	217.471.000	4 buku	200.871.000	4 buku	210.914.550	4 buku	210.914.550	Bagian Tapem
					Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota	Jumlah Laporan Evaluasi Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota	Buku Laporan	1 Buku Laporan	70.421.763	1 Buku Laporan	106.828.748	1 Buku Laporan	92.203.300	1 Buku Laporan	81.278.300	1 Buku Laporan	85.342.215	1 Buku Laporan	85.342.215	Bagian Tapem

					Kepada Camat	Kepada Camat yang tersedia														
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepastian Batas-Batas Gampong	100%	100%	11.839.522.296	100%	12.897.950.258	100%	5.843.480.929	100%	2.813.630.929	100%	2.954.312.476	100%	2.954.312.476	Bagian Tapem
					Pembuatan Pilar Tanda Tapal Batas	Jumlah Pilar dan Pemetaan Batas Gampong yang tersedia	5 Peta dan 50 Pilar Tapal Batas	5 Peta dan 60 Pilar Tapal Batas	372.620.938	5 Peta dan 60 Pilar Tapal Batas	420.132.805	5 Peta dan 60 Pilar Tapal Batas	422.827.039	5 Peta dan 60 Pilar Tapal Batas	306.327.039	5 Peta dan 60 Pilar Tapal Batas	321.643.391	5 Peta dan 60 Pilar Tapal Batas	321.643.391	Bagian Tapem
					Sertifikasi, Pemetaan, Pengukuran dan Pematokan Tanah Asset Pemko	Jumlah Buku Sertifikat dan Peta Tanah Aset Pemko	10 Buku Sertifikat	10 Buku Sertifikat	11.511.901.358	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Tapem

					Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pemerintah dan Publik	Pembelian atau pembebasan tanah untuk kepentingan umum Pemerintah dan Publik	Buku sertifikat-	Buku sertifikat	0	24 buku sertifikat	12.168.304.352	15 buku sertifikat	5.420.653.890	15 buku sertifikat	2.507.303.890	15 buku sertifikat	2.632.669.085	15 buku sertifikat	2.632.669.085	Bagian Tapem
					Desk PEMILU	Jumlah Desk Pemilu	keg	keg	0	2 Keg	309.513.101		0		0					Bagian Tapem
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum bagi Aparatur Pemerintah Kota	100%	100%	143.821.938	100%	183.800.986	100%	217.471.000	100%	182.725.773	100%	191.862.062	100%	191.862.062	Bagian Tapem
					Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah	Jumlah buku LKPJ, LPPD, suplemen LPPD dan ILPPD Walikota Banda Aceh	4 Buah Buku	4 Buah Buku	143.821.938	4 Buah Buku	183.800.986	4 Buah Buku	217.471.000	4 Buah Buku	182.725.773	4 Buah Buku	191.862.062	4 Buah Buku	191.862.062	Bagian Tapem



					Pemerintah Kota															
					Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota	Jumlah Qanun tantang lembaga daerah Pemko Banda Aceh	12 lembaga	5 Ragan	136.058.500	5 SKPD	136.000.000	5 SKPD	142.076.750	5 SKPD	82.413.500	5 SKPD	86.534.175	5 SKPD	86.534.175	Bagian Organisasi
					Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Pelaksanaan penyusunan SPM dilingkungan SKPD	SKPD	SKPD	0	4 SKPD	0	4 SKPD	49.865.600	4 SKPD	38.465.600	4 SKPD	40.388.880	4 SKPD	40.388.880	Bagian Organisasi
					Penyusunan Penetapan Kinerja	Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja Kota Banda Aceh dan Penetapan Kinerja Sekretariat Kota Banda Aceh	2 buah	2 Buah	24.701.000	2 Buah	24.709.650	2 Buah	26.449.700	2 Buah	26.620.700	2 Buah	27.951.735	2 Buah	27.951.735	Bagian Organisasi
					Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD	Jumlah aturan yang jelas tentang Tupoksi dan Uraian tugas	4 lembaga	4 lembaga	41.302.000	4 lembaga	41.057.900	4 lembaga	41.236.800	4 lembaga	33.336.800	4 lembaga	35.003.640	4 lembaga	35.003.640	Bagian Organisasi

					SKPD dan Lembaga Pemerintah Lainnya															
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya jumlah dokumen Analisis Jabatan PNS	100 %	100 %	252.493.000	100 %	331.196.000	100%	350.951.400	100 %	183.527.800	100%	192.704.190	100%	192.704.190	Bagian Organisasi
					Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah dokumen Analisis Jabatan PNS	31 Dokumen	46 dokumen	252.493.000	46 dokumen	331.196.000	46 dokumen	350.951.400	46 dokumen	183.527.800	46 dokumen	192.704.190	46 dokumen	192.704.190	Bagian Organisasi
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	orang	orang	0		0		300.000.000		0		0			Bagian Organisasi
					Pendidikan dan Pelatihan Spiritual dan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Spritual	orang	orang	0		0	-	300.000.000		0		0			Bagian Organisasi

					Kepemimpinan dan Kepemimpinan																
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya jumlah Lakip Kota Banda Aceh dan Lakip Sekretariat Daerah Kota	100 %	100 %	47.031.000	100 %	51.034.800	100%	0	100 %	68.014.700	100%	71.415.435	100%	71.415.435	Bagian Organisasi	
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pelaksanaan penyusunan lakip Kota Banda Aceh dan Lakip Sekretariat Daerah Kota	2 Buah	2 Buah	47.031.000	-	0	-	0	2 Buah	68.014.700	2 Buah	71.415.435	2 Buah	71.415.435	Bagian Organisasi	
					Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Jumlah Persentase Pemahaman tentang Penyusunan LAKIP dan TAPKIN bagi PNS pada SKPD	100 %	100 %	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	0	0	Bagian Organisasi

				Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	Jumlah peserta yang dilatih	50 orang	orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bagian Organisasi
				Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Persentase Pemahaman Pegawai terhadap Tata Naskah dinas	orang	orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bagian Organisasi
				Penyusunan Peta Jabatan	Jumlah dokumen peta Jabatan	Dokumen	Dokumen	0	1 dok	51.034.800	-	0	-	0	-	0	0	Bagian Organisasi
				Penyusunan Kompetensi Jabatan	Pelaksanaan Penyusunan Kompetensi Jabatan	Dokumen	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bagian Organisasi
				Evaluasi Jabatan	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Dokumen	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bagian Organisasi
				Penyusunan Peta	Jumlah Dokumen Peta	Dokumen	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bagian Organisasi





					Program Penyemaran Syiar Islam	Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Islam	20 %	20%	1.243.765.000	20%	1.336.966.000	20%	1,357,938,100	20%	769.300.600	100%	842.769.270	100%	842.769.270	Bagian Keistimewaan
					Seminar Hisab dan Ru'yah	Jumlah Peserta Seminar Hisab dan Ru'yah Kota Banda Aceh	180 Orang	180 orang	117.175.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Keistimewaan
					Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Islam	7 kali	7 kali	1.094.590.000	7 kali	1.285.611.000	7 kali	1.216.659.100	7 kali	735.398.800	7 kali	772.168.740	7 kali	772.168.740	Bagian Keistimewaan
					Rapat Koordinasi Antar Lembaga Keistimewaan	Jumlah rapat koordinasi antar Lembaga Keistimewaan Aceh	6 kali	6 kali	32.000.000	6 kali	51.355.000	6 kali	141.279.000	6 kali	33.901.800	6 kali	35.596.890	6 kali	35.596.890	Bagian Keistimewaan
					Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	Meningkatnya Jumlah Anggota Majelis Taklim di Kota Banda Aceh	100%	100%	186.950.000	100%	151.800.000	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Keistimewaan

					Pembinaan Majelis Taklim	Pelaksanaan Majelis Taklim di Gampong-gampong	100 Majelis	100 Majelis	186.950.000	50 Majelis	151.800.000	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Keistimewaan
					Program pemberdayaan sarana ibadah	Penyelenggaraan kegiatan ibadah yang nyaman di mushalla pemko	214 kali	214 kali	254.000.000	214 kali	377,600,000	213 kali	624,100,000	213 kali	414,300,000	213 kali	435.015.000	213 kali	435.015.000	Bagian Keistimewaan
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah pelayanan kepada Jamaah Mushalla Pemko dan Masjid Agung Al-Makmur	214 kali	214 kali	254.000.000	214 kali	377,600,000	213 kali	624,100,000	213 kali	414,300,000	213 kali	435.015.000	213 kali	435.015.000	Bagian Keistimewaan
					Program Pengembangan Mu'amalah	Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Takziah dan Silaturahmi	100 %	100 %	79.000.000	100 %	86.900.000	100%	87.740.000	100 %	52.494.000	100%	55.118.700	100%	55.118.700	Bagian Keistimewaan
					Pembinaan Ukhuwah Islamiyah dan	Jumlah Kunjungan Takziah dan Silaturahmi	34 kali	50 Kunjungan	79.000.000	50 Kunjungan	86.900.000	50 Kunjungan	87.740.000	50 Kunjungan	52.494.000	50 Kunjungan	55.118.700	50 Kunjungan	55.118.700	Bagian Keistimewaan

						Takziah	Takziah		Takziah		Takziah		Takziah		Takziah				
				Ukhuwah Insaniyah															
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan MTQ dan pembinaan kafilah MTQ	20%	20%	1.668.120.000	100%	615.028.000	100%	520.517.000	100%	548.329.700	100%	575.746.185	100%	575.746.185	Bagian Keistimewaan
				Pendukung pelaksanaan kegiatan MTQ	Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ XXXI Provinsi Aceh	347 orang	75 orang	991.100.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Keistimewaan
				Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Festival Anak Sholeh	Pemilihan peserta Festival Anak shaleh Indonesia (FASI) yang dapat bersaing ditingkat propinsi	834 orang	1000 orang	180.000.000	1000 orang	418.708.000	1000 orang	354.850.000	1000 orang	381.574.700	1000 orang	400.653.435	1000 orang	400.653.435	Bagian Keistimewaan
				Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Festival Qasidah Rebana	Jumlah kegiatan Festival Qasidah Rebana	1 kali	1 kali	131.075.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Keistimewaan

					Tingkat Kota Banda Aceh	Tingkat Kota Banda Aceh														
					Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Training ESQ Profesional	Jumlah Peserta Pelatihan ESQ	250 orang	110 orang	365.945.000	110 orang	196.320.000	220 orang	165.667.000	220 orang	166.755.000	220 orang	175.092.750	220 orang	175.092.750	Bagian Keistimewaan
					JUMLAH				3,898,649,000		3,243,328,000		3,277,839,600		2,191,774,300		2,301,363,015		2,301,363,015	Bagian Keistimewaan
					<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>															
					Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Jumlah Data Kebutuhan Pangan Kota Banda Aceh	100 %	100 %	21,774,925	100 %	69.294.150	100%	320.520.400	100 %	287.706.200	100%	302.091.510	100%	302.091.510	Bagian Administrasi Perekonomian

					Monitoring dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Jumlah Data kebutuhan Pangan Kota Banda Aceh	12 bulan	12 bulan	21,774,925	12 bulan	37.253.400	12 bulan	40.370.500	12 bulan	41.385.457	12 bulan	43.454.705	12 bulan	43.454.7305	Bagian Administrasi Perekonomian
					Pemantauan Pendistribusian Kuota BBM dan Gas	Jumlah Data Pemantauan pendistribusian Kuota BBM dan Gas	Dok	Dok	0	1 dok	13.414.150	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Administrasi Perekonomian
					Penyusunan Data Informasi Pelaku Usaha	Jumlah Dokumen Informasi Pelaku Usaha	Dok	Dok	0	1 dok	18.626.600	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Administrasi Perekonomian
					Pembinaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha	Jumlah Data Pembinaan dan pengendalian Izin Tempat Usaha	Dok	Dok	0	-	0	1 dok	131.355.000	1 dok	111.285.001	1 dok	116.849.251	1 dok	116.849.251	Bagian Administrasi Perekonomian
					Pembinaan Badan Usaha Milik	Jumlah Data Pembinaan Badan usaha	Dok	Dok	0	-	0	1 dok	148.794.900	1 dok	135.035.562	1 dok	141.787.340	1 dok	141.787.340	Bagian Administrasi

					Daerah (BUMD)	Milik Daerah (BUMD)													Perekonomian	
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Peserta Sosialisasi Penanaman Modal	100%	100%	60.000.000	100%	8.753.100	100%	38.181.600	100%	38.350.300	100%	40.265.815	100%	40.265.815	Bagian Administrasi Perekonomian
					Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Sosialisasi Penanaman Modal	100%	100%	60.000.000	100%	8.753.100	100%	38.181.600	100%	38.350.300	100%	40.265.815	100%	40.265.815	Bagian Administrasi Perekonomian
					Program Pengembangan	Meningkatnya Data Informasi Perencanaan Pembangunan	100%	100%	24.679.275	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Administrasi

					data/infor masi	Ekonomi Kota Banda Aceh												Perekon omian		
					Penyusuna n dan Analisis Data Informasi Perencanaa n Pembangun an Ekonomi	Jumlah Data Informasi Perencanaan Pembangun an Ekonomi Kota Banda Aceh	1 buku	1 buku	24.679.2 75	-	0	-	0	-	0	-	0	1 buku	0	Bagian Administ rasi Perekon omian
					Program Peningkata n Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Jumlah Data Informasi Potensi Daerah Kota Banda Aceh	100 %	100 %	61.017.5 25	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	0	Bagian Administ rasi Perekon omian
					Penyusuna n Data Informasi Potensi Daerah	Jumlah Data Informasi Potensi Daerah Kota Banda Aceh	100%	100 %	61.017.5 25	-	0	-	0	-	0	-	0	100 %	0	Bagian Administ rasi Perekon omian
					Program Peningkata n Promosi dan	Jumlah Data Pengembang an Ekonomi Daerah Kota	100%	100 %	25.520.8 80	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	0	Bagian Administ rasi

					Kerjasama Investasi	Banda Aceh Berbasis yang tersedia												Perekonomian		
					Penyusunan Database Pengembangan Ekonomi Daerah	Jumlah Data Base Pengembangan Ekonomi daerah Kota Banda Aceh	100 %	100 %	25.520.880	-	0	-	0	-	0	-	0	100 %	0	Bagian Administrasi Perekonomian
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Administrasi Perekonomian
					Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan pemeliharaan perangkat aplikasi website dan evaluasi hasil input	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Administrasi Perekonomian
					Monitoring, pengendalian dan pengawasan rumah	Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha rumah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bagian Administrasi Perekonomian

					kecantikan dan bilyar	kecantikan dan bilyar														
					Monitoring dan pengendalian rumah makan berlabel halal	Pelaksanaan pengawasan rumah makan di Kota Banda Aceh	%	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Bagian Administrasi Perekonomian	
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan qanun bidang perekonomian	Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan qanun bidang penanaman modal	%	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Bagian Administrasi Perekonomian	
					JUMLAH				192,992,605		78,047,250		358,702,000	-	326,056,320		342,357,141		342,357,141	Bagian Administrasi Perekonomian
					TOTAL				40,194,348,815		47,180,893,503		46,011,780,658	-	31,212,719,721		32,845,960,688		32,845,960,688	



## Kegiatan

Dari kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, yaitu :

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Layanan Penguatan Kelembagaan Secara elektronik e-Kinerja
- Pelaporan Program Pembangunan
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
- Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa
- Penyusunan Renstra SKPD
- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi
- Media yang menyebarkan informasi Pemerintah Kota
- Penyusunan naskah pidato KDH
- Penyediaan Bahan bacaan untuk aparatur
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- Pembangunan Rumah Jabatan
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Luar Negeri

Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan Publik

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

Peningkatan Sistem Pelayanan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan.

Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja

Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Pembuatan Buku Juknis/Juklak

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Penyusunan Peta Jabatan

Penyusunan Kompetensi Jabatan

Evaluasi Jabatan

Penyusunan Peta Kebutuhan PNS

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota

Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD

Penyusunan Penetapan Kinerja

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Penyusunan dokumen IKM

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penjabaran kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dikemukakan pada indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel IV C. 29



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kinerja pada awal periode RPJMD	2013	2014	2015	2016	2017	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas	80	20	40	60	80	100	100
2	Meningkatnya Pemberitaan positif mengenai program Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	7200	8640	10800	11000	12240	12855	12855

3	Tersedianya regulasi yang efektif dan efisien	45	45	45	45	45	45	225
4	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	0	16.175.000.000	18.305.000.000	20.555.000.000	23.055.000.000	25.655.000.000	25.655.000.000

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penjabaran kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dikemukakan pada indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel IV C. 29

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Revisi Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota Banda Aceh hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2006 lalu. Karena itu Renstra Sekretariat Daerah ini sekaligus juga merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh ini merupakan pedoman bagi seluruh Bagian untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang harus dipedomani dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus mengacu kepada Rencana Strategis sebagaimana disebutkan di atas dan merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Lembaga Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh itu sendiri dan menjadi bagian penting dari pencapaian keberhasilan pembangunan di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Januari 2016  
**an. WALIKOTA BANDA ACEH**

**Sekretaris Daerah Kota**

**Ir. BAHAGIA, Dipl.SE**

**Pembina Utama Madya**

**Nip. 19611218 198909 1 00**